



Kecamatan Inklusi Ditarget Rampung 2021

YOGYA - Dinas Sosial Kota Yogyakarta menargetkan pada 2021 mendatang semua kecamatan yang berjumlah 14 di wilayah setempat akan menjadi kecamatan inklusi guna meningkatkan partisipasi dan peran seluruh masyarakat untuk mewujudkan Kota Inklusi.

Program yang sudah bergulir sejak 2017 lalu itu kini sudah menyentuh sebanyak 10 kecamatan. Empat kecamatan lain yang belum yakni Kecamatan Ngampilan dan Gondomanan yang akan diberlakukan pada tahun depan, kemudian dilanjutkan pada 2021 pada Kecamatan Mergangsan dan Pakualaman.

"Penerapan kecamatan inklusi bukan suatu hal yang gampang kita juga harus melakukan pembedampingan kepada pengurus di tingkat

kecamatan supaya program dapat berjalan maksimal," kata Kepala Dinas Sosial Kota Yogyakarta Agus Sudrajat, Jumat (6/12).

Maka itu, pihaknya akan menerapkannya secara bertahap. Berdasarkan catatan pihaknya saat ini terdapat 3,477 warga penyandang disabilitas yang terdiri dari sekitar 1.800 laki-laki dan 1.500 perempuan di Kota Yoga. Adapun jumlah itu tersebar paling banyak pada wilayah Umbulharjo dengan jumlah 555 penyandang disabilitas.

Kepala Bidang Advokasi dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Yoga, Tri Maryatun menyatakan, pada setiap kecamatan inklusi mesti terbentuk Forum Kecamatan Inklusi (FKI) yang akan bekerjasama dengan Lembaga Pemberdayaan Ma-

sarakat Kelurahan (LPMK), perwakilan penyandang disabilitas dan juga kelompok masyarakat lain.

Satu dari sejumlah kecamatan yang dinilai cukup sukses dalam menerapkan program itu yakni Kecamatan Jetis. Pihaknya juga akan menyusun pelbagai indikator guna melakukan penilaian terhadap program itu.

"Melalui pembentukan kecamatan inklusi kami harap akan muncul kepedulian masyarakat terhadap para penyandang disabilitas, yakni dengan melibatkan mereka dalam perencanaan pembangunan," ujarnya.

Sementara, Direktur Sentra Advokasi Perempuan, Disabilitas, dan Anak (Sapda), Nurul Sa'adah Andriani menyatakan, kapasitas para pengurus di

tingkat kecamatan masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Pasalnya, sejumlah pengurus FKI masih dalam tahap belajar dan berproses sehingga belum sepenuhnya menjangkau dan memahami persoalan disabilitas dan juga keberagaman. Pun dengan pengoptimalan penggunaan anggaran, dianggapnya belum terlalu baik.

Namun begitu, menurut dia sejumlah kecamatan yang telah diterapkan sebagai wilayah inklusi terus akan berbenah untuk mengakomodir aksesibilitas dan juga akomodasi bagi para difabel. "Ada sejumlah fasilitas yang sudah baik dalam artian ada ramp dan kursi prioritas. Tapi layanan bagi penyandang tunarungu memang belum semua kelihatan," jelasnya. **(jsf)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005